

**BAGIAN WARISAN BAGI ANAK KANDUNG DARI
HASIL PERKAWINAN LAKI-LAKI MINANGKABAU
DENGAN PEREMPUAN BATAK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**RONY SANTHO BACKTIAR
135010101111140**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 14
A. Hukum Keluarga	14
B. Hukum Waris Islam	18
 BAB III METODE PENELITIAN	 46
A. Sifat dan Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
a. Bahan Hukum Primer	46
b. Bahan Hukum Sekunder	47
c. Bahan Hukum Tersier	47
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	47
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	48
F. Defenisi Konseptual	48
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 52
A. Pembagian Waris Apabila Pewaris Beragama Islam	52
1. Apabila Anak Kandung Perempuan Satu Atau Lebih	56
2. Apabila Anak Kandung Laki-laki	56
3. Apabila Anak Kandung Laki-laki Mewaris Bersama Anak Perempuan	57
B. Pembagian Warisan Apabila Pewaris Beragama Non Muslim	57
1. Apabila Pewaris Adalah Laki-laki Minangkabau	57
A. Bagian Anak Laki-laki	68
B. Bagian Anak Perempuan	69
2. Apabila Pewaris Adalah Perempuan Batak	72
A. Bagian Anak Laki-laki	74
B. Bagian Anak Perempuan	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, Malang dengan judul : “ **Bagian Warisan Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak.** ”

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H, LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
3. Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Fitri Hidayat, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya buat penulis.
5. Ibu tercinta R. Situmorang yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Serta teman-teman yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Malang, 12 September 2018

Rony Santho Backtiar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Bagian Warisan Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak.

a. Nama : **Rony Santho Backtiar**

b. NIM : **135010101111140**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Disetujui pada Tanggal : **3 Agustus 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M

NIP : 19660622 199002 2 001

Fitri Hidayat, S.H.,M.H

NIP : 201208 850707 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM

NIP : 19720622 200501 1 002

RINGKASAN

Rony Santho Backtiar, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Agustus 2018. **Bagian Warisan Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak**, Dr. Siti Hamidah, S.H, M.M, Fitri Hidayat, S.H, M.H

Masalah warisan anak kandung dalam suatu perkawinan dimana Laki-Laki Minangkabau dengan Perempuan Batak, belum dapat dipastikan warisan tersebut diterima oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Masalah warisan ini belum jelas diatur dalam KUHPerdata ataupun melalui Putusan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak, Laki-Laki Minangkabau dan Perempuan Batak tidak mempunyai kesepakatan apabila warisan tersebut diberikan kepada anak laki-laki atau anak perempuan sama rata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian dan berapa besar bagian warisan kepada anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan dari hasil perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan Perempuan Batak.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menjelaskan masalah warisan secara normatif berdasarkan literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif konseptual yang menjelaskan konsep dari sebuah materi yang bersumber dari buku, makalah dan sumber lain yang representatif yang berkaitan dengan “ Bagian Warisan Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak. ”

Bagian warisan anak kandung dari hasil perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan Perempuan Batak, bila si pewaris beragama Islam maka mempergunakan Hukum Waris Islam. Sedangkan bila si pewaris beragama Non Islam mempergunakan Hukum Adat. Mengingat warisan bagi anak kandung dari hasil perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan Perempuan Batak beragama Non Islam belum diatur dengan jelas pada KUHPerdata maupun putusan Mahkamah Agung sehingga disarankan mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum.

SUMMARY

Rony Santho Backtiar, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya. Agustus 2018. *Part of legacy given to biological daughter/son of marriage between minangkabau man and batak woman*, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M, Fitri Hidayat, S.H, M.H

The problem of inheritance of biological children in a marriage where Men Minangkabau with Batak Women cannot be ascertained that the inheritance is received by boys or girls. This inheritance problem is not yet clearly regulated in the Civil Code or through the Supreme Court Decision. This is because both parties, Minangkabau Men and Batak Women do not have an agreement if the inheritance is given to boys or girls equally.

Based on the background above, the formulation of the problem stated in this study is how the division and how much portion of inheritance is given to biological children of male and female children from the marriage of Minangkabau Men with Batak Women.

To answer the formulation of the problem above, this type of research is normative juridical namely explaining inheritance problems normatively based on literature or based on applicable laws. This research is conceptual descriptive which explains the concept of a material that comes from books, papers and other sources that are related to the "Inheritance Section of biological children from the marriage of Minangkabau men with Batak women".

The inheritance of biological children from the marriage of Men Minangkabau with Batak Women, if the heir is a Muslim, then uses Islamic Inheritance Law. Whereas if the heir is a Non-Islamic religion, he uses Customary Law. Considering the inheritance of biological children from the Minangkabau Men marriage with Non-Islamic Batak Women has not been clearly regulated in the Civil Code or the Supreme Court ruling so it is recommended to submit to the District Court to obtain legal certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam mulai dari Sabang sampai Merauke serta memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda juga sehingga Negara Indonesia sering disebut dengan negara yang multikultural.

Batak adalah suatu suku bangsa yang mendiami daerah pegunungan di pantai barat Sumatera Utara, suku bangsa batak terbagi 6 (enam), yaitu:

1. Batak Karo meliputi daerah dataran tinggi Karo, Sibolangit Deliserdang.
2. Batak Simalungun meliputi daerah Raya Simalungun dan sekitarnya.
3. Batak Toba meliputi daerah Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang, dan Samosir.
4. Batak Pakpak meliputi daerah Pakpak Barat, Dairi dan sekitarnya.
5. Batak Mandailing meliputi daerah Mandailing, P. Sidempuan, Padang Lawas Selatan
6. Batak Angkola meliputi daerah Sipirok, Padang Lawas Utara.¹

Suku Batak adalah suatu suku bangsa yang menganut sistem Patrilineal dimana berdasarkan garis keturunan si laki-laki atau ayah, dan sistem pewarisannya juga diturunkan kepada anak laki-laki kandung yang berhak mewarisinya.

¹ Koentjaraningrat, Manusia & Kebudayaan Di Indonesia, hlm 95

Budaya Batak sangat dipengaruhi oleh penyebaran ajaran agama Nasrani atau Kristen yang dibawa oleh misionaris dan zending dari bangsa Eropa atau Barat, maka tentu pula sistem pewarisannya juga ada terpengaruh oleh penjajah dari bangsa Eropa atau Barat.

Minangkabau adalah suatu suku bangsa yang ada di Sumatera Barat, dimana suku bangsa Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan dari si perempuan atau ibu, dan suku bangsa Minangkabau juga menerapkan ajaran atau prinsip dari agama Islam dalam hal sistem pewarisan, karena dimana Minangkabau disebarkan oleh pedagang dari Arab yang telah beragama Islam, maka tentu juga terpengaruh dari ajaran agama Islam yang ada di Alquran baik segala hal misal sistem peribadahan, sistem pewarisan, sistem hukum. Namun ada juga orang dari suku Minangkabau tidak menerapkan ajaran agama Islam yang ada di Alquran tetapi memilih hukum adatnya. Dalam hal pewarisan yang memegang warisan adalah dari keluarga ibu atau si perempuan yaitu Mamak atau Paman sebagai Pewaris, harta warisan tersebut dan diwariskan kepada kemenakannya perempuan sebagai ahli warisnya dan dibagikan secara sama rata.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Perkawinan memiliki aturan yang begitu rumit, begitu juga dengan masalah ahli waris dalam sebuah perkawinan haruslah

² Pasal 1 UU N0.1 Tahun 1974

diatur secara rinci dan mendetail tetapi hukum di Indonesia kurang pasti dan tegas dalam mengatur masalah ahli waris tersebut.

Masalah warisan anak kandung dalam suatu perkawinan dimana laki-laki dan perempuannya berlainan suku, maka kita tidak mengetahui kepada anak kandung berjenis kelamin apa yang akan menerima warisan tersebut apakah anak laki-laki atau anak perempuan, masalah ini belumlah jelas diatur dalam KUH Perdata ataupun Putusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang warisan tersebut ataupun dalam hukum adat itu sendiri, ini disebabkan karena dari kedua belah pihak yaitu laki-laki Minangkabau dan Perempuan Batak tidak mempunyai kesepakatan atau kurang setuju bila warisan tersebut diberikan sama rata kepada semua anak kandung yang mereka miliki, dan bila diajukan ke Pengadilan Negeri mereka tidak mau.

Bila warisan itu dibagi menurut Hukum Agama Islam, maka jelas sekali anak kandung yang berjenis kelamin laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak dibanding anak perempuan, tetapi bila warisan itu dibagi dengan cara hukum adat masing-masing kedua belah pihak maka anak laki-laki belum tentu mendapatkan warisan yang banyak dibanding anak perempuan. Maka dari situlah Penulis ingin mengangkat judul skripsi Penulis yaitu tentang warisan anak kandung.

Tabel 1:
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Universitas/ Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Irlia Rozalin	Universitas Sumatera Utara/2016/ Tesis	Pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di kecamatan Medan Area kelurahan Tegal Sari III Kota Medan	1. Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan? 2. Apakah faktor penyebab perubahan pandangan masyarakat Minangkabau	Peneliti membahas Pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III kecamatan Medan Area Kota Medan dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Namun dalam kenyataannya

				<p>di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan terhadap pembagian waris pusaka rendah?</p>	<p>ditemukan bahwa, pertama pembagian warisan dilakukan berdasarkan kehendak orang tua yaitu ahli waris sama- sama mendapatkan bagian warisan tanpa melihat jenis kelaminnya. Kedua, jika harta belum dibagi pada saat orang tua meninggal</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>maka harta waris di bagi berdasarkan kesepakatan bersama.</p> <p>Ketiga, jika tidak ada kesepakatan bersama, maka akan diajukan gugatan ke pengadilan.</p>
--	--	--	--	--	---

2.	Frans Cory Melando Marpaung	Universitas Sumatera Utara/2009/ Tesis	Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)	1. Bagaimana perkembangan unsur-unsur ahli waris pada masyarakat Batak Karo di tiga desa (desa Merdeka, desa Gongsol, desa Jaranguda), Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat	Pergeseran yang terjadi pada hukum waris adat Batak Karo, khususnya pada tiga desa (desa Merdeka, desa Gongsol, desa Jaranguda) Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, adalah Pemberian kepada anak
----	--------------------------------------	---	--	---	---

				<p>Batak Karo di tiga desa (desa Merdeka, desa Gongsol, desa Jaranguda), Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ?</p> <p>3. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran Hukum Waris Adat Batak Karo pada masyarakat Batak Karo di</p>	<p>perempuan yang dahulu merupakan pemberian kasih sayang dari anak laki-laki kepada anak perempuan sudah menjadi pemberian yang harus menjadi kewajiban bagi anak laki-laki kepada anak perempuan dalam pelaksanaan pembahagian</p>
--	--	--	--	--	--

				tiga desa (desa Merdeka, desa Gongsol, desa Jaranguda), Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ?	harta warisan dalam hukum waris adat Batak Karo.	
3.	Wahyuni Retno Wulandari	Universitas Trisakti/ 2000/Tesis	Hukum Islam masyarakat Minangkabau	waris dalam masyarakat Minangkabau	1. Sistem hukum apa yang harus diterapkan pada seseorang dalam masyarakat Minangkabau dalam pembagian warisannya 2. Apakah	Peneliti membahas adat Minangkabau khususnya bertentangan dengan hukum Islam dan bila bertentangan apa yang harus

				<p>hukum adat umumnya, Adat Minangkabau khususnya saling bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaan hukumnya.</p> <p>3. Bagaimana menangani permasalahan yang mungkin timbul, sebagai akibat perbedaan sistem hukum, sistem kekeluargaan/ waris, serta</p>	<p>dilakukan untuk mengatasinya .</p>
--	--	--	--	---	---

				fikih Islam yang ada di Indonesia.	
--	--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pembagian dan berapa besar bagian warisan bagi anak kandung dari hasil perkawinan laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengkaji cara pembagian dan berapa besar bagian warisan anak kandung dari hasil perkawinan laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian mengenai masalah pembagian warisan anak kandung.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para pembaca atau ahli hukum dan untuk masyarakat adat Batak dan Minangkabau.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang dari permasalahan yang penulis angkat, menjabarkan permasalahan, menerangkan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini dan menjabarkan isi dari penulisan secara sistematis.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab kedua ini, penulis menjelaskan mengenai apa itu pengertian hukum keluarga, hukum waris islam dan hukum waris adat. Penulis juga menjabarkan latar belakang hukum waris yang ada di Indonesia yaitu : Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Lalu dalam penulisan ini, penulis juga menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup dalam pewarisan yaitu harta warisan, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, sistem pewarisan, dan sumber hukum pewarisan berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB III : Metode Penelitian

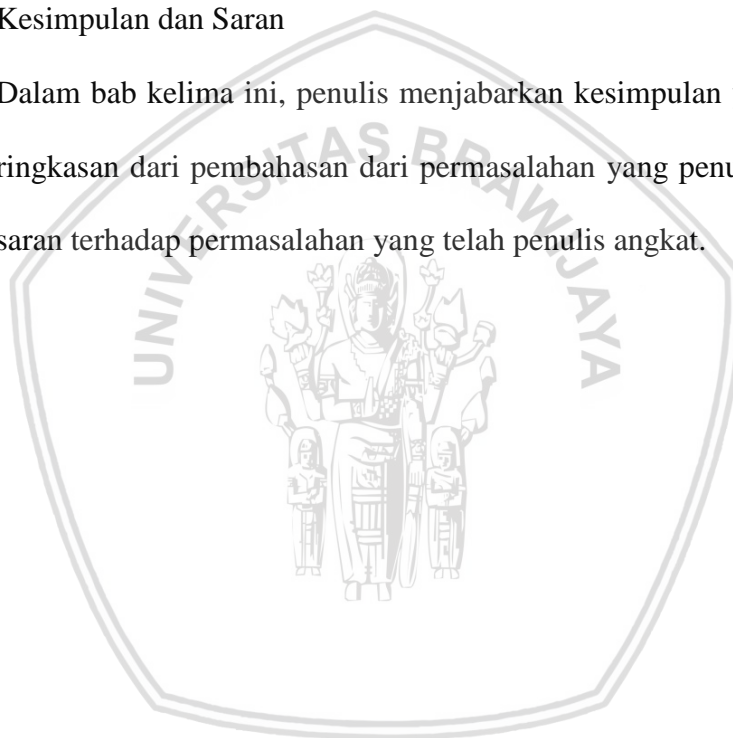
Dalam bab ketiga ini penulis memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab keempat ini, penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan khusus mengenai hukum waris adat Minangkabau dan Batak, pembahasan mengenai pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau, Hukum Waris Adat Batak dan Hukum Waris Islam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab kelima ini, penulis menjabarkan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan dari permasalahan yang penulis angkat, serta saran terhadap permasalahan yang telah penulis angkat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Keluarga

Hukum Keluarga adalah segala aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pergaulan hidup keluarga. Keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami-istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Dalam pengertian yang luas adalah apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat perkawinan, maka berkumpullah anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah.³

Mengingat hukum keluarga erat kaitannya dengan perkawinan, maka disini Penulis ingin menjelaskan arti hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, hubungan adat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta hubungan upacara adat dan keagamaan.⁴

³ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, hlm 138

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, lihat hlm 8

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, Syarat Sah Perkawinan adalah:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6, Syarat-Syarat Perkawinan adalah antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

⁵ Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974

Menurut Hukum Adat syarat sahnya perkawinan adalah pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama atau kuno seperti sipelebegu atau pemuja roh di kalangan orang Batak atau Kejawan di kalangan orang Jawa dan Sunda Wiwitan di kalangan orang Sunda.⁶ Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah: untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan laki-laki atau ayah, garis keturunan perempuan atau ibu serta garis keturunan laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.⁸

Susunan atau garis keturunan terbagi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis atau Susunan keturunan laki-laki atau patrilineal, misal: Ambon, Batak, Bali, Nias, Papua.
2. Garis atau Susunan keturunan perempuan atau matrilineal, misal: Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo (Sumatera Selatan)
3. Garis atau Susunan keturunan laki-laki dan perempuan atau bilateral atau parental, misal: Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, dll.⁹

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm 26

⁷ Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm 22

⁹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, hlm 137

Dalam hukum perkawinan adat mengenal 3 Sistem yaitu:

1. Sistem Endogami¹⁰

Sistem Endogami adalah Sistem perkawinan dimana orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, sistem ini terdapat di Toraja, namun sudah semakin jarang karena interaksi masing-masing anggota masyarakat.

2. Sistem Eksogami

Sistem Eksogami adalah Sistem perkawinan dimana orang diharuskan kawin diluar suku keluarganya. Misal: Gayo, Alas, Batak, Nias, Minangkabau, Buru, dan Seram.

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami adalah Sistem ini tidak mengenal larangan atau suatu keharusan seperti halnya dalam sistem Endogami dan Eksogami. Larangan yang ada biasanya menyangkut masalah nasab (keturunan dekat) dan musyawarah (keiparan), Misal: Aceh, Melayu, Bangka, Belitung, Kalimantan atau Dayak, Minahasa, Ternate, Sulawesi Selatan, Papua, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, hlm 137

B. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris dalam Islam

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sumber utama dalam Hukum Waris Islam adalah Al Quran surat An-Nisa' ayat 11-12, Menurut hukum faraidh, pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir qadar/ketentuan, dan pada sya'ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh sya'ra¹¹

2. Sebab kewarisan

2.1. Harus ada Muwarits (pewaris) yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang merupakan condition sine quo-non, baru ada masalah kewarisan apabila ada seseorang yang meninggal dunia.

2.2. Pewarisan hanya berlangsung karena sebab kematian.¹²

3. Asas atau Prinsip

3.1. Prinsip Ijbari :

Peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pelaksanaannya atas kehendak Allah bukan karena kehendak pewaris dan ahli warisnya. Pelaksanaannya juga tidak memberatkan ahli warisnya.

¹¹ <http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-warisan-menurut-al-quran.html>

¹² Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Waris Islam, hlm 49

Andaikata harta warisan tidak mencukupi untuk menutupi sangkutannya, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi utang-utangnya itu, cukup dibayarkan sebatas harta benda yang ditinggalkannya. Kalaupun ahli waris akan melunasi hutang-hutangnya bukanlah karena perintah hukum, tetapi hanya karena atas dasar etika dan moral mulia dari Ahli Warisnya.

Berbeda dengan KUHP, peralihan harta dari pewaris bergantung pada kehendak ahli waris yang bersangkutan. ahli waris dimungkinkan bisa menolak menerima kewarisan dan menolak pula segala konsekuensinya. Demikian pula terhadap wasiat, hanya diperkenankan maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh hartanya.

3.2. Prinsip Individual

Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya untuk dimiliki secara perorangan. ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dasarnya Surat an-Nisa : 7, bahwa setiap ahli waris laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabatnya. Makna berhak atas warisan tidak berarti warisan harus dibagi-bagikan apapun bentuknya, tetapi bisa saja tidak dibagi-bagikan sepanjang itu atas kehendak bersama para ahliwarisnya, misalnya ahli waris tidak berada di tempat, atau masih anak-anak. Tertundanya pembagian warisan itu tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Yang terlarang dalam al-Quran (an-Nisa

ayat 2) adalah mencampurkan harta anak yatim dengan harta yang tidak baik atau menukarnya dengan harta yang tidak seimbang, dan larangan memakan harta anak yatim bersama hartanya. Prinsip individual ini terdapat perbedaan mendasar dengan sistem kewarisan adat yang mengenal kewarisan kolektif yang tidak dibagi kepada seluruh ahli waris melainkan dimiliki bersama, yaitu harta pusaka, tanah ulayat.

3.3. Prinsip Bilateral

Kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Jenis kelamin bukanlah halangan kewarisan dalam waris Islam. Dasarnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 khususnya pada ayat 7. Dapat ditegaskan bahwa prinsip bilateral berlaku baik garis ke atas maupun ke samping.

3.4. Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian

Peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Tidak ada pewarisan sepanjang masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk dalam hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan hanyalah melalui kematian. Dalam KUHP dikenal kewarisan secara ab intestato yang tidak juga mengenal kewarisan secara wasiat yang dibuat pewaris se masa masih hidup. Hal relevan dengan prinsip ijbari dimana seseorang dapat bertindak bebas atas harta

kekayaannya semasa masih hidup, tidak lagi setelah meninggal dunia. Kata warasa menunjukkan bahwa proses kewarisan berlaku setelah kematian (fi'il maadhi). Prinsip kematian ini agak berbeda dalam kewarisan adat, kewarisan dapat dimulai sejak pewaris masih hidup

Professor Soepomo mengaskan bahwa : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud (immateriele goeden) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Dalam pewarisan adat dengan adanya proses mencar atau mentas dari seorang anak terhadap orang tuanya untuk meniti kehidupan mandiri, biasanya orang tua membekalinya dengan harta benda milik orang tuanya.

Dalam adat jawa waris adalah mengoperkan harta benda keluarga kepada keturunan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.¹³

¹³ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

4. Rukun dan Syarat

Terdapat tiga rukun kewarisan islam :

1. Pewaris (muwarist)
2. Ahli Waris
3. Warisan (irst, mirats, maurust, turats, dan tirkah)

Syarat-Syarat Kewarisan Islam

1. Meninggal dunianya pewaris.
2. Hidupnya ahli waris.
3. Mengetahui status kewarisan.¹⁴

C. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Hukum Waris Adat

1.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah aturan hukum yang mengatur tentang menetapkan harta kekayaan, baik immaterial dan material yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus cara, proses dan waktu penyerahan harta kekayaan atau harta warisan tersebut.

1.2. Sejarah Hukum Waris Adat

Hukum waris adat itu berasal dari corak dari hukum adat yang berlaku di setiap daerah yang mempunyai adat istiadat dan hukum adat yang beragam, ketika terjadi masalah penentuan ahli waris anak kandung yang latar belakang orang tuanya berbeda suku bangsa, maka disinilah hukum waris adat dapat digunakan untuk

¹⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html>

menyelesaikan masalah warisan tersebut. Hukum waris adat paling tidak juga dipengaruhi oleh waris BW yang berasal dari Belanda yang pola pembagian warisannya juga hampir mirip meskipun ada perbedaan. Pandangan pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam suatu pewarisan bukan saja hanya hak milik tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (harta kekayaan) dan disamping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.¹⁵ Disini Penulis ingin menjelaskan Pembagian warisan menurut hukum adat Laki-laki Minangkabau dan Perempuan Batak.

1.3. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak

1. Sistem pewarisan individual yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
2. Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.
3. Sistem pewarisan minorat laki-laki, selain anak sulung, anak bungsu laki-laki juga dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya, misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tuanya, maka ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

¹⁵ J. Satrio, Hukum Waris, hlm 2

D. Pewaris

Pewaris baik menurut hukum barat ataupun menurut hukum adat dan hukum agama pada dasarnya adalah sama yaitu orang yang ketika ia meninggal dunia ia meninggalkan sebuah harta peninggalan atau harta warisan, yang akan beralih atau diteruskan kepada para ahli warisnya. Pewaris dapat terbagi 3 yaitu:¹⁶

1. Pewaris Barat

Di dalam pasal 830 KUHPerdara (BW) dikatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung oleh sebab kematian, dari asas pokok hukum barat ini berarti yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia sedangkan yang belum meninggal dunia masih belum pewaris.

Apakah yang dimaksud dengan mati (meninggal atau wafat), Mati adalah tidak bergerak, jadi orang yang dikatakan sudah mati atau meninggal adalah orang yang sudah tidak bergerak lagi organ tubuhnya, jantungnya sudah berhenti bekerja.

2. Pewaris Adat

Dalam hal pewaris adat perlu diingat susunan kekerabatan dapat juga mempengaruhinya yaitu: menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal), garis keturunan perempuan (matrilineal), dan garis keturunan laki-laki dan perempuan (parental).

2.1. Pewaris Pria (Ayah)

Dalam garis keturunan laki-laki, misal Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku, maka pada umumnya yang menjadi ahli warisnya adalah laki-laki

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 23

bukan perempuan. Dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria dapat dibedakan antara pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris laki-laki (ayah, paman, saudara laki-laki) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi ke atas yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pewaris mayorat pria dan kolektif pria. Pewaris mayorat pria sebagaimana berlaku dalam masyarakat Lampung Pe padun adalah penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi. Pewaris kolektif pria berlaku di Batak, NTT, Maluku adalah penguasa bersama atas seluruh harta pusaka tinggi yang dipimpin oleh pewaris yang paling tua, pewaris paling muda adalah salah satu dari pewaris yang cakap.

Pewaris pusaka rendah adalah pewaris pria yang ketika meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para pewaris. Sebagaimana berlaku dalam kalangan masyarakat adat Rote (NTT), para pewaris itu meninggalkan harta yang terdiri dari yaitu:

1. Harta milik pewaris sendiri (ayah)
2. Harta milik istri (ibu)
3. Harta bawaan istri (ibu) yang disebut dengan “ bua fua uma. ”
4. Harta pencarian suami dan istri bersama yang disebut Ue Malak.

2.2. Pewaris Wanita (Ibu)

Dalam susunan kekerabatan Matrilineal yang menjadi ahli warisnya adalah wanita yang dibantu dengan Mamak atau Paman sebagai Pewaris.

Yang diwariskan dapat berupa pusaka tinggi dan rendah.

2.3. Pewaris Agama

Menurut agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih juga tidak ketentuan yang menerangkan tentang pewaris yang banyak dijelaskan adalah tentang faraid yaitu mengenai pembagian warisan. Jadi apabila seseorang beragama Islam meninggal dunia meninggalkan harta warisan, maka harta warisannya itu sudah ditentukan pembagiannya.

Untuk pewaris agama Islam dapat ditarik dari Alquran surah An-Nisa ayat 7, yang terutama sebagai pewaris adalah ibu-bapak dan keluarga dekatnya. Yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah seperti: kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki, dan perempuan, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Alquran.¹⁷

¹⁷ Ibid, Hilman Hadikusuma, hlm 32

E. Warisan

Warisan atau Harta Warisan adalah seluruh harta dan atau hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau kepemilikannya setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris. Warisan terbagi 2 (Dua), yaitu:¹⁸

1. Warisan Barat

Oleh karena hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) tidak termasuk hukum publik. Jadi suatu kedudukan jabatan tidak dapat diwariskan, kecuali kedudukan raja yang secara turun temurun.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Subekti bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan. Jadi harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat diwariskan. Jadi harta warisan menurut hukum waris barat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
2. Kewajiban alimentasi (memberi nafkah hidup) suami kepada istrinya.
3. Uang santunan asuransi jiwa yang telah diterima ketika si pewaris masih hidup.
4. Hak pengarang dan atau hak cipta menurut ketentuan undang-undang hak cipta.
5. Perjanjian kerja seperti diatur dalam pasal 1603 KUHPerdara.
6. Perjanjian penitipan barang seperti diatur dalam pasal 1717 KUHPerdara.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 33

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan/jabatan
2. Kekuasaan orang tua
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri
4. Hak menikmati hasil
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota organisasi
6. Persetujuan kerja perorangan
7. Perjanjian dagang, kongsi dagang, perseorangan
8. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban memberi nafkah
9. Hak orang tua menyangkal sah anaknya.¹⁹

2. Warisan Adat²⁰

Berbeda dari hukum waris barat yang hanya mengatur tentang harta warisan yang bernilai ekonomis, maka dalam hukum waris adat yang dimaksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi juga non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai kehormatan adat dan yang bersifat religius magis. Sehingga apabila si pewaris meninggal dunia maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada ahli waris, tetapi juga benda yang tidak berwujud, seperti halnya kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan dan lain-lain.

¹⁹ Ibid, hlm 34

²⁰ Ibid, hlm 36

Jenis-jenis harta warisan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan adat atau jabatan adat bersifat turun temurun merupakan suatu warisan yang tidak berwujud benda. Misal kedudukan atau jabatan kepala adat, petugas-petugas adat, seperti raja-raja di Batak, Penghulu suku, Mamak sebagai Kepala Pewaris di Minangkabau. Pada masyarakat patrilineal pada umumnya kedudukan atau jabatan adat dipegang oleh kepala adat atau yang mempunyai keturunan laki-laki yang paling tua, kecuali apabila pewaris kepala adat itu tidak mempunyai anak laki-laki maka kedudukan kepala adat diwariskan oleh penggantinya dari keturunan yang kedua. Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara lelaki (tertua atau yang cakap) dari keturunan wanita dari si pewaris, seperti halnya jabatan penghulu atau mamak kepala pewaris di Minangkabau.

2. Harta Pusaka²¹

Harta pusaka terdiri dari :

2.21. Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah semua harta yang berwujud benda, benda tetap seperti bangunan dan tanah, benda bergerak seperti alat perlengkapan, pakaian adat, perhiasan adat, alat senjata, alat pertanian, perikanan, peternakan, dan tidak berwujud benda seperti amanat pesan, petuah, dll.

²¹ Ibid, hlm 38

Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah ladang, kebun, sawah, danau yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat yang disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat, dan adanya bekas tempat pemukiman, ada kuburan, ada bekas tunggal tanaman keras/musiman, ada bekas bangunan, dll.

2.2. Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu kebanyakan juga tidak lagi terletak di kampung asal, tetapi di luar kampung.

2.3. Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah seluruh harta warisan atau harta peninggalan yang berasal dari bawaan suami dan istri ketika melangsungkan suatu perkawinan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau bergerak, mungkin berasal dari bagian dari harat pusaka atau warisan orang tua/kerabat masing-masing.

2.4. Harta Pencaharian

Harta yang berasal hasil usaha dari suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono gini, dll). Harta pencaharian ini bukan saja terdiri dari bidang tanah (ladang, kebun, sawah dan pekarangan) bangunan, alat-alat dapur, pakaian, alat

elektronik, dll. Pada umumnya harta pencaharian tersebut merupakan milik bersama suami istri.²²

3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah seseorang yang berhak mewarisi dan menerima harta warisan atau harta peninggalan si pewaris sebelum si pewaris meninggal dunia, harta warisan itu dapat diwariskan berupa harta pusaka tinggi dan rendah, wasiat, dll.

Ahli Waris dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

3.1. Waris Barat

Menurut hukum waris barat (BW) tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, begitu juga tidak dipermasalahkan darimana asal usul harta warisan itu ada, yang penting bahwa harta warisan itu bersifat ekonomis atau memiliki nilai uang.

Menurut ketentuan perundangan dan ahli waris testamenter, Ada empat jenis golongan ahli waris yaitu:

1. Golongan pertama terdiri dari suami/istri dan keturunannya.
2. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunannya.
3. Golongan ketiga terdiri dari leluhur lainnya.
4. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya menyamping dan sampai keturunan yang keenam.²³

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 43

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 54

3.2. Waris Adat

Dalam ahli waris adat terbagi 3 yaitu:

3.2.1. Waris Patrilineal

Pada masyarakat patrilineal yang menjadi ahli waris adalah anak-lak-laki sedangkan anak perempuan bukan menjadi ahli waris. Kemungkinan bagi anak perempuan menjadi ahli waris sangat kecil sekali, kecuali disebabkan oleh ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya atau ia sebagai anak perempuan yang diberikan kedudukan sebagai anak pengganti dengan melakukan perkawinan ambil pria.²⁴

Di masyarakat Batak anak sulung laki-laki juga menguasai harta warisan atau harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus secara bersama oleh anggota keluarga dari keturunan ayahnya. Tetapi bila anak sulung laki-laki pergi merantau atau tidak bersedia untuk mengurusnya, maka yang berkewajiban untuk menggantikannya adalah anak laki-laki yang bungsu. Di tanah Batak atau juga di daerah lainnya Nampak adanya perubahan dimana anak perempuan juga mendapat harta warisan , namun bukan harta pusaka tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI)sebagai berikut:

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 63.

Putusan MARI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961. Berisi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak untuk mendapatkan harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Putusan MARI No. 506 K/Sip/1968 tanggal 22 Januari 1969. Berisi: Di Tapanuli anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka almarhum ayahnya.²⁵

3.2.2. Waris Matrilineal

Pada masyarakat matrilineal yang berdasarkan garis keturunan perempuan atau ibu yang menjadi ahli warisnya adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan menjadi ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam garis keturunan matrilineal berbeda dari kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam garis keturunan patrilineal. Di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, maka seluruh anak perempuan yang mempunyai hubungan darah adalah ahli waris dari harta pusaka keturunannya yang tidak terbagi-bagi pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh mamak sebagai kepala pewaris tentang hak-hak pemakainnya. Harta pusaka tinggi

²⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 71

tersebut dilarang beralih pemilikannya dari suku yang satu ke suku yang lain dan pewarisannya tidak boleh terputus melainkan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan. Menurut adat Minangkabau yang dikatakan kemenakan itu dibagi menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Kemenakan yang memiliki hubungan darah, yaitu anak-anak dari saudara-saudara perempuan menurut garis keturunan ibu.
- b. Kemenakan yang memiliki hubungan adat, yaitu anak orang lain yang akrab karena telah bertetangga dalam satu payung.
- c. Kemenakan yang memiliki hubungan budi, yaitu anak orang lain yang sering datang berkunjung dibawah perlindungan satu penghulu.
- d. Kemenakan yang dibawah lutut, yaitu anak orang yang asalnya tidak jelas dan keturunan pembantu (budak) yang menetap sebagai anggota kerabat.²⁶

Pada masyarakat Minangkabau kemungkinan anak laki-laki sangat kecil untuk menjadi ahli waris, apabila salah satu dari mereka ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan. Anak laki-laki tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil wanita.

²⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 99

Menurut hukum adat Minangkabau anak laki-laki yang paling tua berfungsi sebagai mamak dan sebagai pewaris yang menguasai dan mengatur harta pusaka tinggi, berupa bidang tanah, ladang, kebun atau sawah, rumah gadang, untuk kebutuhan kemenakan perempuannya dengan hak genggam bauntuik secara kolektif. Jadi mamak sebagai pewaris itu adalah saudara laki-laki dari ibu kandung atau disebut paman.²⁷ Kedudukan atau jabatan waris fungsi mamak sebagai tungganai (kepala rumah gadang) dan mamak sebagai kepala pewaris terhadap harta pusaka kolektif terutama tanah, apabila tanah sudah berubah penguasaannya dari hak kolektif menjadi hak individu, karena tanah boleh digadai, boleh dijual lepas atas persetujuan bersama anggota-anggota parui, maka fungsi dan peranan mamak sebagai kepala pewaris menjadi lemah terhadap pusaka tinggi terlebih harta pusaka adat rendah.²⁸

3.2.3. Waris Agama

Agama Islam

Menurut Undang-Undang Agama pasal 171 tentang hukum kewarisan antara lain:

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan sipewaris,

²⁷ Ibid, hlm 100

²⁸ Ibid, hlm 100

menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang telah dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan/harta waris.
3. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Wasiat adalah pemberian satu benda dari si pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
6. Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁹

²⁹ Undang-Undang Agama tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171

Kelompok ahli waris antara lain:

1. Menurut hubungan darah :

- 1.1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 1.2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan beserta saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda/duda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan itu bisa anak, ibu, janda/duda.³⁰ Jika dari hasil perkawinan antara laki-laki Minangkabau beragama Islam dengan perempuan Batak beragama Islam mempunyai anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan akan mendapatkan bagian:

$\frac{1}{2}$ bagian jika seorang diri

$\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.

Dan anak laki-laki akan mendapatkan masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki yang lain. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan.³¹

Disini Penulis ingin membahas masalah terkait dengan judul tentang : Bagian Warisan Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak (Studi Berdasarkan Perspektif Hukum Adat).

³⁰ Ibid hlm 187 Undang-Undang Agama tentang Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Otje Salman, Hukum Waris Islam, hlm 57

1. Pewaris

Pewaris baik menurut hukum barat ataupun menurut hukum adat dan hukum agama pada dasarnya adalah sama yaitu orang yang ketika ia meninggal dunia ia meninggalkan sebuah harta peninggalan atau harta warisan, yang akan beralih atau diwariskan kepada para ahli warisnya. Pewaris dapat terbagi 3 (tiga) yaitu:³²

a. Pewaris Barat

Di dalam pasal 830 KUHPerdata (BW) dikatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung oleh sebab kematian, dari asas pokok hukum barat ini berarti yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia sedangkan yang belum meninggal dunia masih belum ahli waris.

Apakah yang dimaksud dengan mati (meninggal atau wafat), Mati adalah tidak bergerak, jadi orang yang dikatakan sudah mati atau meninggal adalah orang yang sudah tidak bergerak lagi organ tubuhnya, jantungnya sudah berhenti bekerja.³³

b. Pewaris Adat

Dalam hal pewaris adat perlu diingat susunan kekerabatan dapat juga mempengaruhinya yaitu: menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal), garis keturunan perempuan (matrilineal), dan garis keturunan laki-laki dan perempuan (parental)

³² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 23

³³ Ibid, hlm 24

1. Pewaris Pria (Ayah)

Dalam garis keturunan laki-laki, missal Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku, maka pada umumnya yang menjadi ahli warisnya adalah laki-laki bukan perempuan. Dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria dapat dibedakan antara pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris laki-laki (ayah, paman, saudara laki-laki) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi ke atas yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pewaris mayorat pria dan kolektif pria. Pewaris mayorat pria sebagaimana berlaku dalam masyarakat Lampung pepadun adalah penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi. Pewaris kolektif pria berlaku di Batak, NTT, Maluku adalah penguasa bersama atas seluruh harta pusaka tinggi yang dipimpin oleh pewaris yang paling tua, pewaris paling muda adalah salah satu dari pewaris yang cakap.

Pewaris pusaka rendah adalah pewaris pria yang ketika meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para pewaris. Sebagaimana berlaku dalam kalangan masyarakat adat Rote (NTT), para pewaris itu meninggalkan harta yang terdiri dari yaitu:

1. Harta milik pewaris sendiri (ayah)

2. Harta milik istri (ibu)
3. Harta bawaan istri (ibu) yang disebut dengan “ bua fua uma. ”
4. Harta pencarian suami dan istri bersama yang disebut Ue Malak.³⁴

2. Pewaris Wanita (Ibu)

Dalam susunan kekerabatan Matrilineal yang menjadi ahli warisnya adalah wanita yang dibantu dengan Mamak atau Paman sebagai Pewaris. Yang diwariskan dapat berupa pusaka tinggi dan rendah.³⁵

c. Pewaris Agama

Pewaris Islam

Menurut agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh juga tidak ada ketentuan yang menerangkan tentang pewaris, yang banyak dijelaskan adalah tentang faraid yaitu mengenai pembagian warisan. Jadi apabila seseorang beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisannya itu sudah ditentukan pembagiannya.

Untuk pewaris agama Islam dapat ditarik dari Alquran surah An-Nisa ayat 7, yang terutama sebagai pewaris adalah ibu-bapak dan keluarga dekatnya. Yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah seperti: kakek,

³⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 27

³⁵ Ibid, hlm 28

nenek, saudara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki, dan perempuan, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Alquran.³⁶

2. Warisan

Warisan atau Harta Warisan adalah seluruh harta dan atau hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau kepemilikannya setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris. Warisan terbagi 3 yaitu:³⁷

a. Warisan Barat

Oleh karena hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) tidak termasuk hukum publik. Jadi suatu kedudukan atau jabatan tidak dapat diwariskan, kecuali kedudukan raja yang secara turun temurun.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Subekti bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan. Jadi harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat diwariskan. Jadi harta warisan menurut hukum waris barat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
2. Kewajiban alimentasi (memberi nafkah hidup) suami kepada istrinya.

³⁶ Ibid, Hilman Hadikusuma, hlm 32

³⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, hlm 33

3. Uang santunan asuransi jiwa yang telah diterima ketika si pewaris masih hidup.
4. Hak pengarang dan atau hak cipta menurut ketentuan undang-undang hak cipta.
5. Perjanjian kerja seperti diatur dalam pasal 1603 KUHPerdara.
6. Perjanjian penitipan barang seperti diatur dalam pasal 1717 KUHPerdara.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan/jabatan
2. Kekuasaan orang tua
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri
4. Hak menikmati hasil
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota organisasi
6. Persetujuan kerja perorangan
7. Perjanjian dagang, kongsi dagang, perseorangan dsb
8. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban memberi nafkah
9. Hak orang tua menyangkal sah anaknya.

b. Warisan Adat

Berbeda dari hukum waris barat yang hanya mengatur tentang harta warisan yang bernilai ekonomis, maka dalam hukum waris adat yang dimaksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi juga non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai kehormatan adat dan yang bersifat religius magis. Sehingga apabila si pewaris meninggal

dunia maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda, seperti halnya kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan dan lain-lain.

Jenis-jenis harta warisan ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan adat atau jabatan adat bersifat turun temurun merupakan suatu warisan yang tidak berwujud benda. Missal kedudukan atau jabatan kepala adat, petugas-petugas adat, seperti raja-raja di Batak, Penghulu suku, Mamak sebagai Kepala Pewarsi di Minangkabau, dll.

Pada masyarakat patrilineal pada umumnya kedudukan atau jabatan adat dipegang oleh keturunan laki-laki yang paling tua, kecuali apabila pewaris kepala adat itu tidak mempunyai anak laki-laki maka kedudukan kepala adat diwariskan oleh penggantinya dari keturunan yang kedua.

Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara lelaki (tertua atau yang cakap) dari keturunan wanita dari si pewaris, seperti halnya jabatan penghulu atau mamak kepala pewaris di Minangkabau.

2. Harta Pusaka

Harta pusaka dibagi menjadi dua yaitu:³⁸

a. Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan dan tanah, benda tidak bergerak seperti alat perlengkapan, pakaian adat, perhiasan adat, alat senjata, alat pertanian, perikanan, peternakan, dan tidak berwujud benda seperti amanat pesan, petuah, dll.

Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah ladang, kebun, sawah, danau yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat yang disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat, dan adanya bekas tempat pemukiman, ada kuburan, ada bekas tunggal tanaman keras/musiman, ada bekas bangunan, dll.

b. Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu kebanyakan juga tidak lagi terletak di kampung asal, tetapi di luar kampung.

³⁸ Ibid, hlm 38

3. Harta Bawaan³⁹

Harta Bawaan adalah harta yang berasal dari bawaan suami dan istri ketika melangsungkan suatu perkawinan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau bergerak, mungkin berasal dari bagian dari harta pusaka atau warisan orang tua/kerabat masing-masing.

3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah seseorang atau ahli waris yang menerima harta warisan dari si pewaris sebelum meninggal dunia. Sedangkan Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris, baik berupa harta benda yang dapat bergerak atau harta benda yang tidak dapat bergerak dan harta benda yang sudah dibagi atau yang belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm 40

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif konseptual yang berarti menjelaskan secara Konseptual dimana penelitian skripsi penulis ini mengambil konsep-konsep atau inti-intinya dalam sebuah materi yang tersedia baik dalam buku, makalah, skripsi orang lain, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah Bagian Warisan Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak (Studi Berdasarkan Perspektif Hukum Adat). Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menjelaskan masalah hal Warisan secara normatif berdasarkan literatur atau bahan hukum yang ada dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan mencari bahan hukum dan mengambil inti-intinya secara konsep untuk mendukung data proposal skripsi penulis.

C. Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum adat yang berlaku di Minangkabau dan Batak yaitu Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak serta Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia jika si kedua pihak pewaris beragama Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan tentang bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder ini hanya membantu dan menganalisa dari bahan hukum primer, antara lain: Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya para sarjana dan hasil penelitian lainnya.⁴¹ . Dalam penelitian, bahan hukum sekunder mempunyai manfaat yaitu:

- a. Membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Memberikan deskripsi dan analisis hukum serta perkembangannya.
- c. Memberikan penjelasan terhadap konsep baru atau konsep yang sulit.
- d. Sebagai sumber kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau anotasi.⁴²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terseir yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan berbagi sumber dari internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk menelusuri bahan hukum yang ada adalah dengan teknik studi kepustakaan.

⁴¹ Suratman, Metode Penelitian Hukum, hlm 67

⁴² Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, hlm 90

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan maka bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berupa bahan-bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan Hukum Adat Minangkabau, Hukum Adat Batak dan Hukum Waris Islam serta penambahan dari bahan hukum melalui internet.

F. Definisi Konseptual

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memberikan harta warisan kepada ahli waris, yakni orang yang meninggal dunia dimana meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat yang telah diwasiatkan sebelumnya. Terdapat perbedaan pengertian antara hukum waris barat dan hukum waris Islam dengan hukum waris adat. Di mana menurut hukum waris barat dan hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang telah wafat dengan meninggalkan harta warisan untuk diwariskan pengalihan kepada ahli waris, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Sedangkan menurut hukum waris adat yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan yang akan diteruskan

penguasaan atau pemilikannya, dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.⁴³

2. Warisan

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Warisan menurut hukum waris barat adalah harta kekayaan (vermogen) dapat berupa aktiva atau passiva atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban (dalam bentuk yang bernilai uang) yang akan beralih (terbagi-bagi) dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Menurut hukum waris Islam, warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban agama dan pihak ketiga yang akan beralih dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris pria dan wanita. Sedangkan menurut hukum waris adat, harta peninggalan adalah sejumlah harta kekayaan yang akan diwariskan si pewaris ketika masih hidup atau setelah ia (pewaris) meninggal dunia, dan untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.⁴⁴

⁴³ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 13

⁴⁴ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 13

3. Ahli waris

Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun di luar kawin, serta suami dan istri yang hidup terlama. Menurut hukum waris Islam, ahli waris adalah para anggota keluarga dekat, pria dan wanita yang mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan laki-laki dan juga garis keturunan perempuan, termasuk suami atau istri (janda atau duda) dan orang yang membebaskan pewaris, yang seluruhnya berjumlah 25 orang. Sedangkan menurut hukum waris adat, ahli waris adalah anggota keluarga dekat dari si pewaris yang berhak dan berkewajiban untuk menerima penerusan harta peninggalan atau harta warisan, baik berupa barang yang berwujud yang tidak terbagi atau terbagi maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan.⁴⁵

Bagian Warisan adalah seberapa banyak warisan yang akan diterima oleh si Ahli Waris, sebagaimana yang telah ditentukan si Pewaris. Bagian warisan itu tergantung kesepakatan antara si Pewaris dengan Ahli Waris untuk mewarisi seluruh warisan yang ada pada Pewaris sebelum si Pewaris meninggal.

⁴⁵ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 14

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42, Anak kandung atau Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁶



⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem pewarisan mengenal 3 sistem pewarisan berdasarkan keturunan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah. Sistem pewarisan ini terdapat di Alas, Batak, Lampung, Ambon, dan Papua.
2. Sistem Matrilineal yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan si perempuan atau ibu. Sistem pewarisan ini Minangkabau, Enggano, dll.
3. Sistem Parental yaitu sistem pewarisan yang berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Misal: Sunda, Jawa, dll.⁴⁷

A. Pembagian Waris Apabila Pewaris Beragama Islam

Hukum Waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh yang terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum waris Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm 23

Demikian pula halnya pada masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, maka ketentuan pewarisan berdasarkan hukum waris Islam diberlakukan untuk masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas corak kehidupan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal sangat berpengaruh terhadap ketentuan pewarisan yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Sedangkan jika dilihat pokok-pokok ketentuan pewarisan hukum waris Minangkabau dengan hukum waris Islam, dapat ditemukan perbedaan yang jelas. Seperti dalam ketentuan ahli waris yang berbeda, ketentuan harta peninggalan yang berbeda dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dimana berdasarkan hukum waris Minangkabau yang menjadi ahli waris adalah ibu dan anak perempuan saja. Sedangkan menurut hukum waris Islam, baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya tanpa terkecuali. Dan untuk ketentuan harta peninggalan, menurut hukum waris Minangkabau harta peninggalan yang akan diwariskan kepada anak perempuan adalah harta pusaka dari keluarga ibu. Sedangkan menurut hukum waris Islam harta peninggalan adalah harta yang dimiliki si pewaris secara keseluruhan tanpa membedakan harta atau bukan harta pusaka yang telah dikurangi dengan hutang dan kewajiban-kewajiban dari si pewaris.

Dari perbedaan-perbedaan diatas, maka dapat menimbulkan kerancuan untuk masyarakat adat Minangkabau yang beragama Islam dalam menentukan hukum mana yang berlaku atau yang digunakan dalam pewarisannya. Maka untuk mengatasi kerancuan tersebut, ketentuan yang akan diambil untuk mengatur masalah warisan dikembalikan kepada keyakinan, kehendak dan keinginan dari tiap-tiap masyarakat adat Minangkabau itu.

Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam termasuk dalam golongan *dzul faraa'idh* dan *ashabah* hal ini telah ditentukan tergantung kepada ahli waris lainnya yang ditinggalkan oleh si pewaris. Untuk ahli waris dalam golongan *dzul faraa'idh* bagian yang diterima telah ditentukan dalam Alquran sehingga bagian bagi mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.

Berbeda dengan halnya dengan ahli waris yang merupakan golongan *ashabah* dan *dzul arhaam*, maka bagian mereka yang disebut terakhir merupakan bagian sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris *dzul faraa'idh*.

Anak laki-laki dengan tanpa saudara perempuannya masuk golongan *ashabah*. Sedangkan anak perempuan masuk dalam *ashabah* jika adanya saudara laki-lakinya. Dan untuk anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki, maka masuk dalam golongan *dzul faraa'idh*.

Selain adanya golongan ahli waris yaitu *dzul faraa'idh* , *ashabah* , dan *dzul arhaam* dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu “ahli waris yang didahulukan untuk mewaris” dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan “kelompok keutamaan” terdiri dari empat macam kelompok, di mana kedudukan anak sebagai ahli waris terdapat dalam keutamaan pertama. Uraian dari kelompok keutamaan tersebut adalah :

1. Keutamaan Pertama

- a. Anak, laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang telah meninggal dunia (*mawali*)
- b. Ayah, ibu dan duda atau janda, bila tidak ada anak.

2. Keutamaan Kedua

- a. Saudara, laki-laki atau perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
- b. Ayah, ibu dan duda atau janda, bila tidak ada saudara.

3. Keutamaan Ketiga

- a. Ibu dan ayah, bila ada keluarga
- b. Ibu dan ayah bila salah satu
- c. Ibu dan ayah, bila tidak ada anak dan saudara
- d. Janda atau duda

4. Keutamaan Keempat

- a. Janda atau duda
- b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Sehingga kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak, maka ahli waris lainnya (bapak, ibu, janda atau duda) boleh ada boleh tidak. Adanya tidak adanya anak penentu bagi ada tidak adanya kelompok keutamaan pertama. Jika ada anak, kelompok pertamalah dia, jika tidak ada anak maka bukanlah dia (kelompok ahli waris itu) kelompok pertama.

1. Apabila Anak Kandung Perempuan Satu Atau Lebih

Surat An Nissa ayat 11

- 1.1. Jika hanya ada anak perempuan, dua orang atau lebih maka bagiannya dua per tiga atau $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan orang tuanya.
- 1.2. Sebagai ahli waris tunggal, maka mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) harta orang tuanya (*dzul faraa'idh*).
- 1.3. Ahli waris dua orang atau lebih, maka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan orang tuanya yang dibagi sama rata di antara anak-anak perempuan tersebut. (*dzul faraa'idh*).

2. Apabila Anak Kandung Laki-laki

Surat An Nissa ayat 11

- 2.1. Sebagai ahli waris tunggal, maka mendapat seluruh harta orang tuanya (*ashabah*).
- 2.2. Ahli waris dua orang atau lebih, maka harta warisan orang tuanya dibagi rata (*ashabah*).
- 2.3. Anak laki-laki dengan saudara perempuannya, maka harta warisan dibagi untuk tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan untuk tiap-tiap anak perempuan satu bagian. (*dzul faraa'idh*).
- 2.4. Disamping anak laki-laki dan anak perempuan terdapat ahli waris lain yaitu janda atau duda, ibu, ayah, nenek atau kakek, maka harta warisan dibagikan kepada ahli waris diluar anak sesuai ketentuan *dzul faraa'idh* lalu sisanya dibagi kepada anak-anaknya dengan ketentuan 2:1 (*ashabah*).

3. Apabila Anak Kandung Laki-laki Mewaris Bersama Anak Perempuan

Anak perempuan bersama saudara laki-lakinya, maka harta warisan dibagi untuk tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan untuk tiap-tiap anak perempuan satu bagian *.(dzul faraa'idh)*.

B. Pembagian Warisan Apabila Pewaris Beragama Non Muslim

1. Apabila Pewaris Adalah Laki-laki Minangkabau

Dalam persekutuan hukum (sistem kekerabatan) yang berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) hubungan seorang anak dengan keluarga pihak ibunya lebih tinggi intensitas, derajat dan kepentingannya dibandingkan dengan hubungan anak dengan keluarga bapaknya. Dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal garis keturunan seorang anak ditarik menurut garis keturunan ibu. Seorang anak baik laki-laki atau perempuan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam keluarganya. Hal ini berhubungan erat dengan masalah-masalah keturunan, perkawinan, warisan, tempat menetap dan sebagainya.

Dalam persekutuan hukum (sistem kekerabatan) yang berdasarkan garis keturunan bapak hubungan seorang anak dengan keluarga pihak ibunya lebih rendah intensitas, derajat dan kepentingannya dibandingkan dengan hubungan anak dengan keluarga bapaknya. Dalam masyarakat Batak yang patrilineal keturunan seorang anak ditarik menurut garis keturunan bapak,

hanya anak laki-laki saja yang meneruskan garis keturunan bapaknya, yang keturunan bapaknya yang perempuan tidak.

Pembagian harta warisan anak dari hasil perkawinan antara laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak adalah harta pusaka ayahnya (yang merupakan harta kerabat ayahnya) jatuh kepada kemenakan ayahnya. Sedangkan harta pusaka ibu dan harta pencarian ayah dan ibunya oleh semua anak-anaknya baik perempuan atau laki-laki. Dengan demikian semua anak mempunyai hak yang sama dengan pembagian yang sama terhadap harta dalam keluarga ibunya.

Karena adat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh agama Islam yang dibawakan oleh pedagang dari Arab yang beragama Islam, maka dalam pewarisannya pun akan terpengaruh oleh Alquran sebagai pedoman pembagian warisannya, apabila hukum adat tidak menjamin membaginya secara sama rata. Dalam hal ini pun masyarakat Minangkabau itu masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya dimana yang menjadi ahli waris dari sebuah harta warisan itu adalah anak perempuan tetapi yang membagikannya kepada si ahli waris itu adalah Mamak atau Paman sebagai pemegang kekuasaan. Di adat Minangkabau perempuan sangat dihormati dan dijadikan sebagai ahli waris, maka anak laki-laki jelas tidak mendapatkan warisan dari keluarga si ibu, karena dianggap anak laki-laki lebih kuat dan bisa mendapatkan harta dari hasil pencahariannya sendiri dari luar dimana mereka bekerja.

Dalam adat Minangkabau sistem pewarisan itu diwariskan oleh Mamak atau Paman sebagai Pewaris kepada kemenakan perempuannya sebagai Ahli Warisnya, yang diwariskan itu bisa berupa sako atau saka, pusako atau pusaka, baik itu pusaka tinggi ataupun pusaka rendah, dan warisan itu tidak diwariskan atau dibagikan per tiap individu tetapi dibagikan secara bersama atau komunal. Dan mamak atau paman diwajibkan untuk menjaga serta memelihara harta warisan tersebut sebelum diwariskan atau dibagikan kepada kemenakan perempuannya sebagai ahli warisnya.

Pada masyarakat Minangkabau yang memegang warisan adalah Mamak atau Paman sebagai Kepala pewaris, dan warisan tersebut diwariskan kepada keponakan perempuan dari keluarga si ibu. Peranan mamak dalam adat Minangkabau yang sangat penting terutama dalam hal harta pusako atau harta pusaka kaum dan warisan. Peranan ini dapat kita lihat dalam pepatah adat Minangkabau yang menyatakan:

“kaluak paku kacang balimbiang,

Tampuruang lenggang lenggokan

Dibaok anak rang saruaso,

Anak di pangk kamanakan dibimbing,

Urang kampuang di patenggangkan,

Tenggang adat jan binaso, ”

(kaluak paku kacang balimbing

Tempurung lenggang lenggokan

Dibawa anak orang suraso

Anak dipangku kemenakan dibimbing

Orang kampung dihargai adat jangan binasa)

Tinjauan Umum tentang Sako atau Saka dan Pusako atau Pusaka di Minangkabau

a. Pengertian Sako

Sako (saka) adalah harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusako. Namun disamping itu juga ada yang mengartikan dengan asal atau tua, seperti pepatah berikut: *ado karambie sako pulo* (ada kelapa tapi sudah tua pula). Atau pada kalimat: *sang saka merah putih* (saka disini bermakna “asal atau pertama”).⁴⁸ Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung arti berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusako kebesaran yaitu:

- a. Gelar Penghulu
- b. Garis keturunan ibu (sako induk yang disebut juga dengan matrilineal)
- c. Gelar bapak (pada daerah rantau Pariaman gelar bapak diturunkan kepada anak seperti: Sidi, Bagindo, Marah, Sutan)
- d. Hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta petatah petitihnya.
- e. Adat sopan santun atau tata karma.

⁴⁸ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Tinggi Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Kaum DT Penghulu Panjang Suku Mandaliko, Nagari Limo Kaum) Skripsi , Padang, Universitas Andalas, 2008, hlm 26

Adapun sako atau saka sebagai kekayaan tanpa wujud tentunya harus diwariskan secara turun temurun. Tata cara pewarisannya adalah sebagai berikut:

- a. Gelar penghulu diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki.
 - b. Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan.
 - c. Gelar bapak khusus pada daerah rantau Pariaman diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki.
 - d. Hukum adat beserta petatah petitihi serta adat sopan santun dan tata karma diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam nagari, selingkup adat Minangkabau.
- b. Pengertian Pusako atau Pusaka

Harta Pusako atau pusaka adalah harta peninggalan atau harta warisan orang yang telah meninggal. Harta itu menjadi hak perserikatan dalam suatu kaum oleh segala ahli warisnya, menurut sistem pewarisnya harta pusako atau harta pusaka adalah harta kongsi perserikatan bersama oleh orang yang mempunyai hubungan waris dengan orang yang meninggalkan harta warisan tersebut. Harta pusako atau harta pusaka tidak boleh dibagi-bagi menjadi hak milik individu oleh orang yang menerima pusako atau pusaka itu tapi harta pusako atau pusaka itu dapat dibagi secara berkaum yang sama-sama menerima harta pusako atau harta pusaka tersebut, yang dibagikan oleh mamak atau pamak selaku ahli warisnya. Pusako atau harta pusaka adalah segala harta kekayaan yang berwujud (material) yang diwariskan kepada

kemenakan perempuan. Yang termasuk pusako atau pusaka disini antara lain: sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri, dll.

c. Pembagian Pusako atau Pusaka

a. Harta Pusako Tinggi

Harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat (ter Haar menyebut “ familie ”) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko. Dalam artian bahwa harta pusaka tinggi ini merupakan harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara matrilineal atau garis keturunan perempuan. Harta pusaka tinggi ini terdiri dari saka dan pusaka. Sako atau saka merupakan gelar pusako atau pusaka (tidak berwujud), sedangkan pusako atau pusaka adalah harta yang berwujud seperti tanah.⁴⁹

b. Harta Pusako Rendah

Harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri dari istri beserta anak-anaknya, atau suami dengan saudara-saudaranya yang sekandung beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.⁵⁰ Dalam adat Minangkabau tanah tidak dimiliki oleh individu atau pribadi, tetapi dimiliki secara bersama atau komunal dimana posisi tanah di adat Minangkabau itu sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat adalah

⁴⁹ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Tinggi Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Kaum DT Penghulu Panjang Suku Mandaliko, Nagari Limo Kaum) Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2008, hlm 29

⁵⁰ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Kaum DT Penghulu Panjang Suku Mandaliko, Nagari Limo Kaum) Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2008, hlm 29

tanah yang ada di adat Minangkabau Sumatera Barat yang memiliki nilai harga yang sangat penting.

Pada dasarnya harta pusako atau pusaka itu dikuasai oleh mamak sebagai pewaris dan harta warisan itu tidak dapat dipindah tangankan, baik digadaikan apalagi dijual sebagaimana pepatah adat: Dijual tidak makan beli, digadai tidak makan sando (agunan)

Harta pusako atau pusaka baru dapat digadaikan atau dijual terlebih dahulu dengan mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum, apabila:

1. Rumah gadang katirisan, maksudnya adalah rumah gadang itu rusak dan harus diperbaiki
2. Gadih gadang indak balaki, maksudnya adalah perempuan yang sudah dewasa dan belum menikah
3. Mayik tabujua ditangan rumah maksudnya adalah anggota kaum yang meninggal.
4. Mambangik batang tarandam, maksudnya adalah untuk menegakkan gelar penghulu dari suatu kaum.

d. Macam-macam Harta Pusako atau Pusaka.⁵¹

1. Dilihat dari Wujud Bendanya.

Dilihat dari wujud bendanya, harta pusaka atau pusako ada dua jenis, yaitu tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud dengan tanah disini adalah tanah dengan yang tumubuhan yang berada diatasnya, sedangkan yang dimaksud dengan bukan tanah adalah segala sesuatu yang tidak berwujud berupa tanah.

2. Dilihat dari segi bentuknya.

Dari segi bentuk, tanah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan sebagai tanah pertanian dengan arti masih tetap tinggal sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hutan rendah adalah tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian ataupun dalam bentuk perumahan.

e. Dari segi asalnya.

Adapun dari segi asalnya cara harta atau warisan itu diperoleh oleh seseorang dari generasi sebelumnya sebagai akibat kematian yang berpindah kepemilikan kepada si ahli waris, ada 3 jenis yaitu:

1. Secara dipusakai

Harta yang dipusakoi atau dipusakai adalah harta yang didapat seseorang dari generasi sebelumnya akibat dari kematian dari generasi

⁵¹ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Tinggi Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Kaum DT Penghulu Panjang Suku Mandaliko, Nagari Limo Kaum) Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2008, hlm 32

yang sebelumnya. Dalam hal ini harta pusaka itu terbagi dua yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.

2. Secara Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri, harta ini terbagi 2 (dua) yaitu:

a. Tembilang besi

Tembilang besi yaitu harta yang didapatkan dengan cara taruko dari tanah ulayat kaum.

b. Tembilang emas

Tembilang emas adalah harta atau tanah yang diperoleh dengan cara membeli atau memagangkan uang untuk maksud itu adalah usaha sendiri.

3. Secara Hibah

Harta secara hibah adalah harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk dari hasil pemberian orang lain dan bukan dari hasil kematian dimana yang meninggal itu memiliki harta, harta ini menjadi hibah apabila diwariskan atau dibagikan kepada anak dan cucu.⁵²

⁵² Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Tinggi Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Kaum DT Penghulu Panjang Suku Mandaliko, Nagari Limo Kaum) Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2008, hlm 34

Harta Suami-Istri dalam Perkawinan

Bila terjadi suatu perkawinan pada masyarakat Minangkabau yang sistem perkawinan mereka bersifat semenda, yakni laki-laki tinggal dirumah perempuan sehingga diperlukanlah harta untuk menunjang kehidupan perkawinan tersebut.

Macam-macam harta tersebut antara lain:

a. Harta Tepatan

Yaitu harta yang sudah ada di rumah istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta ini bisa terdiri dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang merupakan milik kaum istri atau harta pencaharian yang diperoleh istri dari usaha sendiri atau diperoleh secara hibah oleh perseorangan.⁵³

b. Harta Bawaan

Yaitu harta yang dimiliki oleh suami sebelum perkawinan itu berlangsung. Harta tersebut ditempatkan suami di rumah istrinya yang digunakan untuk menunjang kehidupan keluarganya. Harta bawaan suami bisa berbentuk pusaka tinggi atau pusaka rendah. Harta tersebut dibawa oleh suami ke rumah istrinya sebagai hak pakai dari kaum. Sebetulnya hal ini tidak lazim berlaku di Minangkabau, karena laki-laki tidak ikut secara langsung menerima pusaka karena pada kenyataannya perempuanlah yang berhak mewarisi harta warisan tersebut. Kemudian harta bawaan tersebut dapat berupa harta pencaharian yang didapatkan

⁵³ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 31

oleh suami dengan usaha sendiri atau diperoleh dengan cara pemberian atau hadiah secara perseorangan.⁵⁴

c. Harta perkawinan atau Harta Suarang

Yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan itu berlangsung, baik atas usaha suami atau atas usaha istri ataupun atas usaha suami istri bersama. Dalam sistem perkawinan tradisional, tidak dikenal adanya harta ini, oleh karena laki-laki tidak mencari harta untuk istri dan anaknya sebagai seorang suami dan ayah, melainkan untuk kemenakanya sebagai seorang mamak namun sesuai dengan perkembangan terhadap hukum adat Minangkabau, harta perkawinan telah diterima dan diakui adanya harta bersama yaitu harta yang berasal dari pencaharian suami dan istri.⁵⁵

d. Pewarisan Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa oleh suami kedalam suatu perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau

⁵⁴ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 32

⁵⁵ Sofira Utama, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Indonesia, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004, hlm 32

tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

1.1. Bagian Anak Laki-laki

1. Pewarisan Harta Pusaka

Jika yang meninggal dunia adalah si ayah. Harta pusaka milik keluarga ayah tidak akan turun dan diwariskan kepada istri dan anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Karena anak-anak dari laki-laki Minangkabau yang telah berkeluarga tetap menjadi bagian dari keluarga istrinya. Sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka milik keluarganya.

2. Pewarisan Harta Bawaan

Untuk pewarisan harta bawaan terhadap anak laki-laki tidak ada sama sekali. Karena harta bawaan yang merupakan harta milik kaum keluarga ayahnya akan kembali kepada kaum keluarga ayah jika si ayah meninggal dunia, dan bukan diwariskan kepada anak-anaknya.

3. Pewarisan Harta Tepatan

Bila suami atau ayah yang meninggal dunia maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya. Hal ini terjadi karena adat Minangkabau di mana laki-laki yang menikah akan tinggal di rumah istri atau keluarga istrinya.

4. Pewarisan Harta Pencaharian

Jika si ayah meninggal dunia, harta pencaharian yang modalnya berasal dari harta kaum si ayah, maka anak laki-laki tidak berhak mewarisinya.

5. Pewarisan Harta Bersama

Untuk pembagian harta warisan yang berasal dari harta bersama jika si ayah meninggal dunia maka anak laki-laki memiliki hak langsung mewarisinya.

1.2. Bagian Anak Perempuan

1. Pewarisan Harta Pusaka

Sebagaimana diuraikan sebelumnya harta pusaka adalah milik kaum sehingga yang berhak atas pewarisan harta pusaka tersebut adalah kaum atau kelompok secara bersama-sama, jadi bukan perorangan. Pada hakekatnya masyarakat Minangkabau yang dimaksud dengan pewarisan terhadap harta pusaka ialah peralihan penguasaan harta hanyalah penguasaannya bukan bendanya. Berdasarkan sistem kekeluargaan Matrilineal di Minangkabau, maka pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan Matrilineal. Mamak berperan mengawas dan mengatur penggunaan harta tersebut.

Sehingga dalam pelaksanaannya, harta pusaka yang telah ada dan dimiliki oleh kaum digunakan bersama-sama sesuai dengan kepentingan kaum. Jika dalam kasus seorang ibu meninggal dunia, maka harta pusaka milik kaum keluarga ibunya akan diwariskan kepada anak perempuannya saja, sesuai dengan sistem Matrilineal. Sedangkan jika si ibu meninggal dunia untuk anak laki-laki Minangkabau, harta pusaka milik keluarga ibunya tidak akan diwariskan kepadanya.

Terdapat pula ketentuan lain jika yang meninggal dunia adalah si ayah. Harta pusaka milik keluarga ayah tidak akan turun dan diwariskan kepada istri dan anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Karena anak-anak dari laki-laki Minangkabau yang telah berkeluarga tetap menjadi bagian dari keluarga istrinya. Sehingga tidak memiliki hak atas harta pusaka milik keluarganya. Sedangkan yang memiliki hak atas pusaka milik keluarganya adalah saudara perempuan beserta keturunannya, yaitu kemenakan perempuannya.

2. Pewarisan Harta Bawaan

Harta bawaan yakni merupakan harta yang dibawa suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berupa harta pencaharian sebelum kawin atau harta yang diperoleh karena hibah atau merupakan hak pakai dari kaum yang sudah ada. Menurut hukum adat Minangkabau, kalau suami meninggal dunia berlakulah suatu ketentuan bahwa harta tersebut kembali ke kaumnya.

Sehingga untuk pewarisan harta bawaan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dari ayahnya tidak ada sama sekali. Karena harta bawaan yang merupakan harta milik kaum keluarga ayahnya akan kembali kepada kaum keluarga ayah jika si ayah meninggal dunia, dan bukan diwariskan kepada anak-anaknya.

3. Pewarisan Harta Tepatan

Harta tepatan yaitu harta yang didapati suami di rumah istrinya. Harta tersebut bisa berasal dari pusaka kaum istrinya atau dari hasil pencaharian

istrinya sebelum menikah. Apabila si istri atau si ibu meninggal dunia, maka harta pencaharian akan menjadi milik anaknya, sedangkan harta pusaka merupakan milik anak perempuannya dan saudara-saudara lain secara matrilineal. Namun bila suami atau ayah yang meninggal dunia maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya.

4. Pewarisan Harta Pencaharian

Harta pencaharian yakni harta yang diperoleh suami selama perkawinan. Ada kala harta pencaharian tersebut diawali dari modal dasar harta pusaka kaum. Dengan demikian harta pencaharian tersebut bergabung dengan harta pusaka. Bentuk harta pencaharian yang demikian dapat disebut dengan harta *tembilang basi*.

Sehingga jika si ayah meninggal dunia, harta pencaharian yang modalnya berasal dari harta kaum si ayah, maka anak-anaknya tidak berhak mewarisinya. Namun perubahan terjadi setelah adanya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seorang ayah pada anaknya. Sehingga diperlukan pemikiran tentang penentuan pewarisan harta pencaharian, dikaji dulu kemurnian dari harta pencaharian tersebut. Harta pencaharian yang sudah digabung dengan harta pusaka kaum tidak mungkin seluruhnya diwarisi kepada anak. Demikian juga dengan kemenakan, tidak dapat menuntut secara pasti harta tersebut sebagaimana tuntutan mereka terhadap harta pusaka kaum.

5. Pewarisan Harta Bersama

Harta bersama yaitu yang didapati oleh suami istri selama perkawinan. Harta ini murni merupakan pencarian mereka yang terlepas kedudukannya dari harta pusaka, harta bawaan atau harta tepatan.

Sehingga untuk pembagian harta warisan yang berasal dari Harta Bersama ini baik ayah maupun ibu yang meninggal dunia, anak-anaknya tak terkecuali laki-laki atau perempuan memiliki hak langsung mewarisinya. Sedangkan untuk ketentuan pewarisan secara Matrilineal, ketentuan pewarisan yang berasal dari harta bersama baik untuk keluarga kaum ayah atau kaum ibu di kesampingkan.

2. Apabila Pewaris Adalah Perempuan Batak

Dalam adat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang

khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan.

Dalam masyarakat Batak non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budayadari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Dalam ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat Batak) Jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh : Tanah (Hauma Pauseang) , Nasi Siang (Indahan Arian) , Warisan dari Kakek (Dondon Tua) , Tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat-istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan. Yaitu berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-laki nya.

Dalam pewarisan masyarakat yang berdasarkan garis keturunan patrilineal misal Batak yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki kandung saja, baik itu yang paling tua atau sulung dan yang paling muda atau bungsu, karena anak perempuan kemungkinan kecil tidak menjadi ahli warisnya. Tetapi perempuan bisa mendapatkan

harta warisan dari si pewaris apabila orang tuanya laki-laki memberikan sedikit kepada anak perempuannya harta warisan tersebut sebagai pegangan hidupnya.

Pewarisan berdasarkan hukum adat Batak, yang berhak untuk mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan itu adalah anak kandung laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Harta warisan itu dapat berupa tanah, rumah peninggalan orang tuanya, deposito/ tabungan di bank, kendaraan, dan lain-lain yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan harta warisan itu dibagikan oleh si pewaris selagi si pewaris masih hidup. Tetapi bila si pewaris tidak memiliki anak kandung laki-laki maka anak kandung perempuan juga berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Dan harta warisan itu sudah dicatatkan oleh si notaris ke dalam akta notarisnya sebagai bukti bahwa harta warisan atau peninggalan itu memang benar-benar ada, apabila di kemudian hari setelah si pewaris meninggal dunia, maka tidak akan terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan diantara anak kandung si pewaris.

2.1. Bagian Anak Laki-laki

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta pusaka. Jumlah harta yang akan menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-laki pewaris, misalnya apabila pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka bagian harta warisannya masing-masing mendapat sepertiga bagian. Namun bila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, maka harta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak

perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada “pengulihen”.

Untuk ayah dan ibu serta saudara- saudara kandung pewaris, ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada anak kandung dan anak angkat pewaris, maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung pewaris menjadi ahli waris secara bersama-sama. Kemudian yang dimaksud keluarga terdekat ini, muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris. Selanjutnya yang terakhir adalah persekutuan Adat ini sebagai ahli waris apabila tidak ada sama sekali disebutkan di atas, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan Adat.

Jika semua anak laki-laki sudah berumah tangga, biasanya bagian terbesar dari harta peninggalan akan dibagi-bagi di antara mereka. Biasanya harta peninggalan tidak dibiarkan lama-lama tidak dibagi, walau beberapa di antaranya mungkin dibiarkan sebagai milik bersama untuk waktu yang lama atau pendek. Barang pusako tidak boleh dibagikan.

Pengecualian yang istimewa adalah pembagian rumah dan sopo. Menurut peraturan yang umum, anak bungsu mendapat tempat utama, hal ini berkaitan dengan tugasnya mengurus orang tua di hari tua. Anak sulung bisa mendapat sopo, jika masih ada anak lainnya yang mesti tinggal di rumah dan sopo, maka anak bungsu mendapat ruang utama rumah induk. Anak tertua juga berhak atas keistimewaan tambahan, hasurungan seperti pangoli yang dibayarkan kakeknya ketika dia kawin (ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan kepada cucu laki-laki lain), dondon tua yang mana suatu pemberian khusus diserahkan kepadanya sebagai penyandang sahala

sihahaanon, sahala dan tua para leluhur. Jika tidak ada peluang mewujudkan salah satu hak istimewa anak sulung selama masa hidup bapaknya, maka ia dapat menyisihkan sesuatu untuk diri sendiri dengan jalan memilih sesuatu yang khusus, atau dengan mengambil bagian yang lebih besar dari anak laki-laki lain pada saat diadakan pembagian harta peninggalan.

Yang merupakan obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, jenis-jenisnya adalah :

1. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah kebun dan perhiasaan lainnya. Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut “ Holong Ate” (kasih sayang).

2. Harta Pencaharian Bersama Suami Istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami

istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

2.2. Bagian Anak Perempuan

Pemberian harta benda dari orang tua kepada, anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut istilahnya dengan "Holong Ate" (kasih sayang). Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "Harta Panjaean" sedangkan harta yang diberikan kepada, anak perempuan disebut dengan "Pauseang". Walaupun sebenarnya artinya sama. Sebelum meninggal si pewaris maka selain dari harta pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan pauseang dan panjaean, antara lain:

1. Indahan arian, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi Pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.
2. Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
3. Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

4. Punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
5. Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal perta ma pada saat mulai membangun rumah tangga.

Bagi anak perempuan yang telah berumah tangga biasanya diberikan parmano-manoan (kenang-kenangan), dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada saudara laki-laki, pada saat pembagian harta peninggalan. Dan anak laki-laki sebagai ahli waris mempunyai tanggung jawab mengurus orang tua di masa tuanya, biasanya ibu tetap tinggal di rumah induk, dan diberi sebagian harta peninggalan untuk kebutuhan hidupnya dan juga anak-anaknya berusaha memenuhi segala kebutuhan ibunya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Oleh karena itu pembagian masalah kewarisan terhadap perkawinan Laki-laki Minangkabau dengan Perempuan Batak tergantung terhadap hukum si pewaris bagaimana mengatur pewarisan kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Bila si pewaris beragama Islam maka menggunakan Hukum Waris Islam dimana Pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan Minangkabau berdasarkan Hukum Waris Islam ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Jika si pewaris tidak beragama Islam maka menggunakan Hukum Adat yang berlaku yaitu :

a. Hukum Adat Minangkabau

Pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan Minangkabau berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dimana Dalam persekutuan hukum (sistem kekerabatan) yang berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) hubungan seorang anak dengan keluarga pihak ibunya lebih tinggi intensitas , derajat dan kepentingannya dibandingkan dengan hubungan anak dengan keluarga bapaknya. Dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal garis keturunan seorang anak ditarik menurut garis keturunan ibu.

b. Hukum Adat Batak.

Masyarakat Batak yang menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara

otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah.

Pada masyarakat Batak, kekayaan yang terbentuk dalam perkawinan adalah harta bersama yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Kedudukan istri dalam harta perkawinan lebih terbatas pada ekonomi rumah tangga yaitu pengelolaan rumah tangga, dalam hal harta bawaannya istri tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan suami. Kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan/ahli waris menurut hukum adat Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal, menurut sistem kekerabatan ini, untuk anak perempuan walaupun bukan ahli waris dalam keturunan tetapi ia diberikan harta baik untuk peuseang sebagai bekal hidupnya pada saat perkawinannya maupun ulosnya pada saat bapak meninggal dunia.

Harta harta bersama adalah kesemua harta yang termasuk dalam ikatan perkawinan, baik itu harta pemberian sebagai bekal rumah tangga pada saat setelah melangsungkan perkawinan seperti panjaean terhadap laki-laki dan pauseang terhadap perempuan, maupun harta hasil jeri payah suami-istri pada saat perkawinan berlangsung. Apabila suami meninggal, jika harta bersama ingin dibagi maka menjadi harta peninggalan dan pembagian harta peninggalan biasanya dilakukan menurut ketentuan adat Batak. Dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan pengitungan tetapi di dasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan. Seperti pewarisan sewaktu masih hidup anak laki-laki diberi panjaen untuk bekal

hidupnya dan anak perempuan diberi peuseang untuk bekal hidup. Sedangkan pembagian setelah meninggalnya pewaris maka anak laki-lakilah yang mewarisi harta peninggalan dengan memperhatikan kebutuhan hidup ibunya, sedangkan bagi anak perempuan yang telah berumah tangga biasanya diberikan parmano-manooan (kenang-kenangan), dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada saudara laki-laki, pada saat pembagian harta peninggalan.

B. Saran

Dikarenakan masalah pembagian harta warisan terhadap perkawinan Laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak tidak terunifikasi hukum waris di Indonesia menyebabkan si pewaris harus memilih hukum yang lebih tepat untuk pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan. Penggunaan hukum waris yang berlaku harus sesuai dengan keadaan si pewaris itu sendiri.

Jika si pewaris Batak seharusnya terdapat kesamaan hak dan tanggung jawab dalam wujud harta bersama, mengingat pada masa sekarang ini istri tidak hanya mengelola dan mengurus rumah tangga akan tetapi ikut berperan aktif dan terkadang menjadi tumpuan keluarga dalam mencari nafkah untuk penghidupan keluarga. Dalam hal harta bawaan yang diperoleh dalam perkawinan harus dipertegas mengingat dalam Batak bila suami meninggal, istri hanya mempunyai hak menikmati seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chaidir, 1997. Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Rineka Cipta, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2015. Hukum Waris Adat, Citra Aditya, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1994. Hukum Waris Islam, Ind Hill Co, Jakarta
- M.S, Amir. , 2003. Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta .
- Projodikoro, Wirjono, 1991. Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 2003. Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, 1992. Hukum Waris, Penerbit Alumni, Purwokerto
- Siahaan, Nalom. 1982. "Adat Dalihan Natolu: Prinsip dan pelaksanaannya". Grafindo, Jakarta.
- Sinaga Richard, 2012. "Perkawinan Adat Dalihan Natolu". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suratman, dan Philips Dillah, 2012. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Malang

Umar Said Sugiarto, 2012. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Ter Haar terjemahan Soebakti Poesponoto, , 1980 . Asas-asas dan Susunan Hukum
Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Wuisman, J.J.J. M., 1996. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, (Penyunting: M.
Hisyam), FE UI, Jakarta.

Jurnal:

Diponegoro Law Journal

Judul : Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Jurnal Hukum dan Pembangunan

Judul : Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau

Volume 37, Nomor 2, Tahun 2007